



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANGGORO BUDI HARTOPO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SPESIALIS PROGRAM STUDI ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
3. NHK : 1001624

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.850.097.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m²/210 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.132.635.000
2. Tanah Seluas 146 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 167.462.000
3. Tanah Seluas 150 m² di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 348 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 332.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA BRIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, VESPA PIAGGIO VESPA Tahun 2020, Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.005.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 115.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 420.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 180.000.000

Sub Total Rp. 6.902.097.000

III. HUTANG Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp.****6.902.097.000****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpni.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpni.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.